

Daftar Pustaka

Buku

Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 90

Acienkz Iluzy. *Analisis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Ditinjau dari Aspek Sosiologis, Yuridis dan Filosofis*. Artikel, diakses 12 Agustus 2023.

Achmat Irmawan, *Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State*, Naskah Publikasi Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020, hlm 6-7

Adam Smith *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (tetkenal dengan nama *Wealth of Nations*) dalam Erly Suandi, 2008, *Hukum Pajak*, Salemba Empat edisi 4 cetakan 2, Jakarta.

Adjat Sudarajat, “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*”. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 3.

Adi Sulistiyono dan Muh. Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Cet I, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm 75

Adrian R. Nugraha, *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*, (Bekasi, 2009), Hlm, 4

A Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, St Paul, Minn: West Group, 1990, hlm. 1588.

Agung Pribadi, *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*, hlm. 1,

A.H. As'ari Taufiqurrohman, *Pengantar studi Konstitusi*, Jilid 1, Penerbit Acadia 2, Yogyakarta, 2012, hlm. 9

Akhmad Sukris Sarmadi, “*Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan*”, dalam *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm. 8.

- Amran Suadi,.Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia Dan Etika,. Edisi Pertama, Prenanda Media Group, 2019, Hal.120 – 121
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Investor di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006. Hlm. 20.
- Andi Hamzah (2), 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Cet.1, Bandung: PT Alumni, hlm.17.
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta, Kanisius, 2001), hal. 16.
- Anton.F.Susanto. 2007. *Hukum dari Cosilence Menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*. Bandung: Refika Aditama. 63.
- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 62
- Bagir Manan, Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996. hlm. 9.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.113.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*, (Yogyakarta :Genta Publishing, 2010), hal. 40.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. halaman 23
- Bunga Rampai, Perundangan Lingkungan Hidup, (Tangerang: Pustaka Widyatamm, Cet Kedua 2006), hal, 3.

- Busyro Muqoddas, dkk, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Ull Press, Yogyakarta, 1992, Hlm 104-,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi kemerdekaan 1945 Hingga Kini, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 54-55
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.
- Erman Rajagugukguk, dkk, *Hukum Investasi*, (Jakarta: UI, Press, 1995), hal. 1-2.
- Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve dan Elsevier Publising Projects, tt), hal. 1470.
- E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, hlm 3-4.
- Eurofer, *European Steel In Figures 2020*. (Brussels,2020)
- European Commissions, *Towards Competitive and Clean European Steel*, (Brussels, 2023),hal.2.
- Gatot Supramono, 2012,*Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 23.
- Gayatri, M. (2010). Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam UndangUndangNomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal). Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

- Hammond, C.R. (2000). "The elements". Dalam John R. Rumble, 2018, *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, edisi ke 99, FL: CRC Press, Boca Raton, hlm. 4.22.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet. 3 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal, 129.
- Haryono, Dhaniswara K. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 85.
- Hasyim Wahid, dkk, *Telikungan kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 1999, Hlm.41
- Hasan., Madjedi. *Kontrak Minvak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. (Jakarta: Flkahati Aneska,2009), hlm.11
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 94-95.
- Hermien H. Koeswadji, 1993, *Pengantar Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta,hlm. 1.
- H. Kaelan,.MS,.*Filsafat hukum Pancasila dan semiotika hukum pancasila*.. Paradigma, Yoyakarta, 2020, hal. 299
- H.L.A.Hart *Concept Law*, diterjemahkan oleh Mohammad Nashihah dan Ronny F Sompie, *Konsep Hukum*,(Jakarta: Cintya Press, 2011), hal. 179.
- Huda, Ni'matul, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung.

Hulman Panjaitan & Abdul Mutalib Makarim, *Op.Cit.*, hal. 4

H.S. Kartadjoemena, *GATT WTO dan Hasil Uruguay Round*, (Jakarta; UI Pres, 1997. hal. 226).

Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal Dalam Hukum Internasional (WTO)*, (Jakarta; Rajawali, 2004), hal. 37.

Hulman Panjaitan, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Jakarta, Ind-Hill, 2003, Hlm. 179

I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006), h. 44.

Ibid., hlm. 79-80.

Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, (Bandung: Alumni, 1994), hal, 171.

Inam Syauckani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik I-lukum*, Raja Graflndo Persada, Jakarta, 1999, hlm 19.

Indah Ambarsari, "Studi Tentang Investor Asing di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 6, No. 1, June 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press 2006, hlm. 19-20

J.M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, (Yale Law Journal 96 edision 4, 1987), h. 744.

J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal, 186.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

John Rawls,. *A Theory of Justice*, Teori Keadilan, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru

Idem. hlm. 121

Jonker Sihombing, *Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Alumni, Bandung, 2010), Hlm. 74.

Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009, Hlm.31

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

Juniarso R dan Achmad S, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa, hlm. 106.

Juwana, Hirnahanto, 2006, *Penyusunan Naskah Akademik sebagai Prasyarat dalam Perencanaan Pembentukan RUU, Departemen Hukum dan HAM*.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, hal 80 82

Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta 1994 hlm. 7

Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Djambatan, Cet Ketiga 2009), hal, 15-17.

Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Hukum Manajemen Investasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal. 3.

Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, Berkeley University of California Press, 1978, (Edisi terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Ceta XVI, Nusa Media, Bandung, 2014, Hlrn. 105-106.

Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan Sebagai Keadilan, Justice as Fairness*, Diktat Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2011, hal. 2.

- Lalu Wira Pria S., Prinsip Hukum Investasi pertambangan Umum. Genta Publishing, Yogyakarta 2014, Hlm. 119.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.35.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan: Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 12
- Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, halaman 23.
- Mahfud MD, Moh, 2011, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mahmul Siregar, *Diseltasi Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Kesiapan Hukum Di Indonesia dalam Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral Yang Terkait Dengan Peraturan Penanaman Modal*, Medan, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005, hlm. 81
- Maria S.W. Sumardjono, *et al.*, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Marry Ann Gledon, Michael W Gordon, dan Christopher Osakwe, *Comperative "Legal Tradition* (St. Paul, Minn: West Publishing Co,1982), Hlm. 13.
- Matlin, Margaret W. (1998). *Cognition*. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. Hlm 112
- Mohammad Hatta. 2015, *Membangun koperasi dan Koperasi Membangun, Koperasi dan, Gagasan dan Pemikiran Hatta*, Penerbit Kompas, Jakarta, Hlm 324.
- Muafidin Haming dan Salim Basalamah, *Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis*, (Jakarta: PPM, 2003), hal. 4.
- Muhamad Rakhmat, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Logoz Publishing, Bandung, 2014, hlm, 32-33

Muhammad Idris, Mengenal Nikel; Logam yang disamakan Edhy Prabowo dengan Lobster, hlm. 1,

Muhammad Nuha Maulana Pasya, "Dampak Lingkungan Dan Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan Pertambangan Di Indonesia," 2020, Hlm. 1-13.

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, Hlm 78.

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 77.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 35.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung. Penerbit Alumni, 2002, hlm. 73-106.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 12-13

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung. 1995, Hlm 13.

Moh. Mahfud md., *membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, Hlm. 56

Moh Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi Rajawali Press*, Jakarta, 2011, hlm. 56

Mohammad Mahfud M.D., *Politik Hukum di Indonesia*, op cit, Hlm- 4.

Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI-Press, 1987), hal, 2-3.

M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 93.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Prenada Media Group. Hal.23.
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Ed. Kedua, Jakarta: Erlangga, hlm. 281.
- Ni'matul Huda, Ibnu Negara, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm.54.
- Nonet, Philippe and Philip Selznick. 2003. *Law and Society in Transition: Toward ResponsifLaw*, edisi terjemahan oleh Huma, Hukum Responsif, Huma, Jakarta, Hlm 60-399
- Nunuk Nuswardani, Upaya Peningkatan Kualitas Putusan Hakim Agung dalam Mewujudkan *Law and Legal Reform*, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 16 Oktober 2009, hal. 522.
- Nurhuda Asrori, Materi Lengkap! Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, <https://geograpik.com>, diakses 3 Oktober 2023.
- Otto Soemarwoto, 2009, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, hlm. 9.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djembatan, 1991), hal, 52.
- Pandji Anogara, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, (Semarang: Pustaka Jaya, 1994) hal.47.
- Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law. Common Law and Socialist Law*, alih bahasa Narulita Yusron (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), Hlm. 62
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.
- Prasetyo,. Cetakan ketiga, Pustakan Belajar 2019, hal 3
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 90
- Rivero, Osvaldo De, *The Myth of Development*, (edisi terjemahan oleh M. Sya'roni Rofii, *Mitos Perkembangan Negara, Perekonomian-Perekonomian Negara yang Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Berkembang di Abad XXI*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, Hlm. 197
- Robert Gilpin & Jean Millis Gilpin, *the Challenge of Global Capitalism* (Terjemahan Haris Munandar & Dudy Priatna, *tantangan kapitalisme global ekonomi dunia abad ke-21 Muri Kencana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1).
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.
- Rosadi, Otong, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 21
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 39.
- Salim, HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2014, hlm. 7
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), hal. 33.

- Santosa Sembiring, Huku,,, Investasi (Jakarta, (Bandung, Raja Grafindo Nuansa Persada, Aulia,2007) 2008) dan Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 77-79.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hal. 82.
- Satjipto Rahardjo, “Delapan Puluh Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia” *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005, hal. 1.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 41
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), Hlm. 70.
- S. F. Marbun, Hukum Administrasi Negara I, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm 14-15.
- Shaleh Lalu M, Wahyu Atjo , *K3 Pertambangan Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sektor Pertambangan*. (Yogyakarta: Deepublish,2019). 13.
- Sigit, Sutaryo, Sepenggal Sejarah Perkembangan Pertambangan Indonesia, Penerbit Yayasan Minergy Informasi Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. (Jakarta : Gramedia 2010), hal. 22.
- Soepardo, et all, Manusia dan Masjarakat Baru Indonesia, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1963, Hlm 97
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT
- Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, halaman 67.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* (Jakarta :UI Press, 1974), hlm. 56.

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayurnedia Publising, 2007), hlm 50

Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, Cetakan pertama, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, Hlm. 283

Statista, *Ease of Doing Business in Indonesiaa from 2013 to 2020*, statista.com, Diterbitkan oleh Departemen Riset Statista, 24 Mei 2023; BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), 2020, *Kemudahan Berbisnis*, Investindonesia.go.id

Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradyana Paramita. Hal.34.

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Internasional pada Masa Nasionalisasi di Indonesia*, (PT. Alumni, Bandung,1975), Hlm. 6.

Sudrajat Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 7

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke- 26 (Bandung: Alfabeta, 2017), hal, 240.

Sumardjono, Maria S.W., et al., 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991 Hlm. 53.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi...*, op.cit, hlm. 148.

- Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan* (Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008), Hlm. 146.
- Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* (Jakarta :UI Press, 1974), hlm. 56.
- Sutandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h. 555.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selecta hukum ekonomi*, penerbit Mandar maju, Bandung, 2000, hlm. 18.
- Stong, C.F. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative & Jackson Limited, Study Of Their History and Existing Form*, The English Book Society and Sidgwick London, 1966 (Edisi terjemahan Oleh Dena srie Widowatie, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm14.
- Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 93
- Thendry, S. (2016). *Desentralisasi Kewenangan Dalam Pengaturan Usaha Pertambangan Di Era Otonomi Daerah. Lex et Societatis, Vol.IV/No.4, 45-53.*
- T. Mulya Lubis, *Hukum Investasi*, 1992, hal. 29.
- Trihastuti, Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya*, Setara Press, Malang.
- Triswan Suseno dan Endang Mulyani, 2012, *Konsep Pengembangan Wilayah Sulawesi Tenggara, Berbasis Komoditas Unggulan Sektor Pertambangan*, *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, Volume 8/Nomor 3/September/2012, Hlm. 120.
- Wahyu Nugroho, "Tersoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan, Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Hukum 1US QUIA 1USTUM NO. 3 VOL 27 September 2020*, hlm 569

WF Prins dalam Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. IX, 1988, hal.95.

Wheare, K-C. *Modern Constitutions*, Oxford University Press, 1 996, (Edisi terjemahan oleh Imam Baehaqie, *Konstitusi - Konstitusi Modern*, Ctk. 5, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.1)

World Trade Organization Document DS592, Op.Cit

Yogie Maharesi, "iklim berbisnis di Indonesia hari ini, bisnis Indonesia", 12 september 2006

Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanja, *Moralitas Hukum*, cetakan I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, Hlm43-44.

Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Yogjakarta: Imperium, 2013), hal 49.

Jurnal dan Hasil Penelitian Ilmiah

Abidin, Ratnasari Fajariya. "Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia). " *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): 322

Achmat Irmawan, *Komparasi Hukum Perijinan Pertambangan Di Indonesia Dalam Perspektif Welfare State*, Naskah Publikasi Program Studi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020.

Adang Abdullah, "Tinjauan Hukum atas UU Penanaman Modal 25 Tahun 2007: Sebuah Catatan" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): Hlm 5.

Bambang Prabowo Soedarso, "Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009", dalam *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Volume 6, Nomor 3, April 2009, hlm. 411

Camelia Malik, "Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia" *Jurnal Hukum Bisnis*, (2002): 18. Dalam artikel tersebut dituliskan sebagaimana dikuti berikut ini: "Kepastian hukum ini meliputi ketentuan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan pengadilan. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang yang mengundang penanam modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya- "

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, 2015, "Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", Makalah, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yogyakarta, 27 Agustus 2015.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM, 2015, "Monitoring dan Evaluasi Atas Hasil Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubawa Provinsi Bengkulu, Lampung, dan Banten", Makalah, Jakarta, 22 April 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1998, hlm. 890.

Departemen Agama, "Kepentingan Daerah Otonom Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia," *Journal Information* 10, no. 3 (2009): Hlm 1-16.

Economic education and entrepreneurship journal (2021) 4 (1): 61 77.

Ernita, Dewi, Syamsul Amar, and Efrizal Syofyan. "Analisis pertumbuhan ekonomi, investasi, dan konsumsi di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi* 1, no. 2 (2013): 93-176. 3

Fenty Puluhulawa, "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum Legalitas*, VOI 3, Nomor 2,2 Agustus 2010, hlm. 7

- Fokky Fuad. Hukum, Peningkatan Ekonomi. Artikel dalam, *Lex Journalica* Vol.5 No. 1, Desember 2007, hlm 16-17.
- Forest Watch Indonesia, “Pertahankan Hutan Adat yang Tersisa”, Makalah, 2013.
- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, Sarah D. L. Roeroe, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pertambangan*, tahun 2021
- Gayatri, M. (2010). Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pemberian Insentif Bagi Investor Asing (Tinjauan terhadap Kepentingan yang Dilindungi dalam Undang-Undang Penanaman Modal). *Penulisan karya Ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Elukum*, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2017. Him 74-75
- Hayati, Tri, 2011, Perizinan Pertambangan di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi tentang Perizinan Pertambangan Timah di Pulau Bangka, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hernawati, R.A.S., & Suroso, J.T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen)*, 4(1), 392–408. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/557>.
- I Made Arya Utama. 2008. Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal Pascasarjana Unpad*. Bandung.
- I Nengah Swardana, et.al, “Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten di Pasar Modal”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, Lisensi CC-BY-SA 4.0, 182-186.
- IS. Susanto: Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1999, Hlm 16-17

Kementerian Keuangan, “Pemekaran Daerah Harus Dikendalikan”, Media Keuangan, Vol. IX No. 81 Mei 2014.\

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers, Nomor: 301.Pers/04/Sji/2020, Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah Dan Daya Tahan Ekonomi, Jakarta, Tanggal: 14 Oktober 2020.

Kementrian Perdagangan. (2013). *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*. Jakarta: Kementrian Perdagangan.

Kementrian Perdagangan. (2013). *Analisis Dampak Kebijakan Pelarangan Ekspor Raw Material Tambang dan Mineral*. Jakarta: Kementrian Perdagangan.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2017, Desember 27). *Investasi dan Keberlangsungan Operasi Fasilitas Pemurnian Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017*.

Kementrian Perindustrian. (2016). *Hilirisasi Pembangunan Industri Berbasis Mineral Tambang*. Jakarta: Kementrian Perindustrian Republik Indonesia.

Laporan Perekonomian Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2021 Dan Dilaporkan Kendari, 29 November 2021

Laurensius Arliman, “Investor Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Investor”, *Supremasi Jurnal Hukum*, Volume. 1, No. 1, 2018.

Menurut Moh.Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam Bingkai Hukum Progresif dan Keadilan Substantif, yang disampaikan dalam diskusi di Surabaya, 13 Februari 2010 menyatakan bahwa seharusnya keadilan substantif bisa diterapkan di Mahkamah Agung juga. Keadilan yang dianut para hakim agung selama ini adalah keadilan normatif, yakni suatu keadilan yang didasarkan pada norma-norma semata. Dengan demikian, harus ditetapkan pula keadilan seperti apa yang dikehendaki agar pada saat perekrutan hakim

- agung dapat digali berdasarkan sikap para calon hakim agung yang kelak dapat melaksanakan tugas sebagai hakim agung dengan berkeadilan yang sesuai dengan harapan.
- Monang Sidabukke, “Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)”. *Tesis*. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, hlm. 32.
- Muhammad Yusuf HS, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Gol.C Tanpa Izin (Studi Kasus Tahun 2014 s/d Tahun 2016 di Kab. Gowa)”, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 30.
- M- Shidqon. Prabowo. Hukum Progresif; Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia. 2009. Artikel dalam jurnal “jurnal QISTIE”, No.3, Vol 3, hlm. 35.
- Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat (Legislation Implication Of The Takeover Authority In Mineral And Coal Mining By The Central Government, vol. 13 No. 01 -Maret 2016, hal. 23
- Nandang Sutrisno, "Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo", Undang: Jurnal Hukum, vol. 3, No. 2 (2020), hlm 255-256
- Nasarudin Muhammad, 2013, Meningkatkan Kinerja Sub Sektor Minerba, Jakarta: Warta Minerba Edisi XV, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. April 2013. Hlm. 8
- Nadya Ahda, “Dibalik Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia,” *Buletin APBN*, Vol.6 Ed.2 (Februari,2023), hal.9
- Nur, K., Juwita,J., & Atmojo, K. (2022), Perlindungan Hukum Investor Terhadap wilyah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, volume 11 Nomor 3, 131-142. Diambil dari <https://journal.unigres.ac.id/index.php/jurnalProHukum/article/view/2134>.
- Onesimus Patiung, "Pengaruh Umur Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara Terhadap Fungsi Hidrologis No Tide,” *Jurnal Hidrolitan 2* (2011): Hlm.60.

Prastiti, Hilda Swandani (2021), Membedah Parameter berusaha Dalam Upaya Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi di Indonesia (Studi Komparasi Indonesia dan Vietnam), Program Jurnal Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dharmasiswa, Volume 1, Nomor 3 (September 2021), 1259- 1274, pasal 13: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss3/13>

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam Sambutan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022, Jakarta, Rabu 30 November 2022.

Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, *Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM,2017),38

Retno Damayanti, "Abu Batubara Dan Pemanfaatannya: Mineral Dan Batubara Tinjauan Teknis: Karakteristik Secara Kimia Dan Toksikologinya," Jurnal Teknologi dan batubara 14 (2012) Hlm- 213

Rita Yani Iyan. "Peran hukum dalam Pembangunan", Artikel dalam "Jurnal sosial ekonomi pembangunan", No.5 Vol 2, hlrn 174.

Rustiono, D. (2008). *Analisis pengaruh investasi, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Setiono, "Rule of Law." (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Elukum Universitas Sebelas Maret, 2004).

Solechah, Siti Nur, "Realisasi Desentralisasi Sektor Pertambangan", Jurnal Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Vol. IV, Nomor 12/II/P3DI/Juni/2012.

Susila, I. Made Yoga Dharma, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pengaruh Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Penanaman Modal di Indonesia." *Kertha Semaya* 3, no. 03 (2015): 2.

Widyaningrum, Tuti. "Hak Menguasai Negara Dalam Pemurnian Mineral Logam Kajian PP NO.I Tahun 2017 Terhadap UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara." *Law Review* 16, no. 3 (2017): 453-454

Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 127-136

World Bank Regional, "Decentralizing Indonesia", World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report, Report Nomor 26191 IND, 2003.

Yoseva, Melya Sarah, and I. Ketut Westra. "Hak Istimewa Bagi Investor Asing dalam Berinvestasi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2015):5.

Yudhistira, et al., "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2011.

Undang-Undang dan Pepres/Permen.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

Undang-Undang RI No. 25, Op.cit., pasal I ayat 3.

BPHN, Naskah Akademik Undang-Undang Yayasan, Tanpa tahun, hlm. 5

Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*;

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor IX/MPR/2001 tentang “Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara KK dan PKP2B diganti dengan rezim perizinan

Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);

Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusaha Tambang Batubara antara Perusahaan Negara dan Kontraktor Swasta;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didinkan dalam Rangka Penanaman Modal Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketentuan-Ketentuan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam rcmbangunan Ilukum Nasional, BPHN Departemen Kehakinam, 1997, hlm. 144.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, "Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja" (Bahan sosialisasi RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 17 Januari 2020).

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409. K/201/M.PE/1996 Tentang Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan ,Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Permen ESDM No.11 tahun 2019 yang berisi tentang larangan ekspor bijih Nikel.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 10/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 3 Desember 2014.

Internet

Hukum Online, "Kontrak Perusahaan Tambang Asing Banyak Merugikan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e848b537f794/kontrak-perusahaan-tambang-asing-banyak-merugikan>, diakses 8 Agustus 2022.

Kemendagri Online, “Dana Perimbangan Sumber Pendapatan Daerah Terbesar”,
<http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/24-dana-perimbangan--sumber-pendapatan-daerah-terbesar>, diakses 8 Agustus 2022.

Pemerintah Kabupaten Berau, “Pertambangan”, <http://www.beraukab.go.id/potensi/view/2/-pertambangan>, diakses 20 Agustus 2022.

Pemerintah Republik Indonesia, “Sumber Daya Alam Provinsi Bangka Belitung”,
<http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-bangka-belitung/sumber-daya-alam>, diakses 8 Agustus 2022.

Kontan, 2019, “BKPM Mencatat Investasi Di Sektor Pertambangan Terus Merosot”,<https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mencatat-investasi-di-sektor-pertambangan-terus-merosot?page=1>. Diakses tanggal 20 september 2022.

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditasminerba.pdf>(Diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Pada pukul 11.36 WIB)

Invest Indonesia, 2019, “Penanaman Modal Asing di Indonesia”,<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/modal-asing-di-indonesia>. Diakses tanggal 22 Januari 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221116194155-4-388709/ri-rayu-negara-produsen-nikel-bikin-organisasi-sekelas-opec>, Diakses tanggal 22 Agustus 2023.

<https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44273/upaya> sistematis pemerintah melanggengkan energi-kotor-batu-bara-melalui-perombakan-sejumlah undang-undang-dimasapandemi/diakses tanggal 7 Maret 2023 Pukul 11.00 Wib

<https://pwypindonesia.org/iWaspek-perizinan-dalarn-uu-nomor-3-tahun-2020> tentang perubahan atas-uu-nomor-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-danbatubara/diakses tanggal 7 Maret 2023 Pukul 11.00 Wib

Ryan Puspa Bangsa, ini-dampak-krusial-undang-undang-minerba-baru/ <https://www.gatra.com/detail/news/488066/ekonomi> diakses tanggal 20 desember 2022, Pukul 11.00 Wib

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230202174557-4-410542/jokowi-janjikan-tambang-nikel-ke-elon-musk-ini-kata-esdm>, Diakses tanggal 22 Agustus 2023.

<https://www.antaraneews.com/berita/230123/indonesia-china-jalin-kerjasama-energi-dan-pertambangan>, Diakses 22, Agustus 2023.

https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju, diakses tanggal 9 Maret 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211126151139-4-294726/bangun-pabrik-mkelbauksit-cs-ri-butuh-investasi-rp304-t> (diakses pada tanggal 22 Juni 2022, Pukul: 02.00 WIB)

<https://innews.co.id/pengelolaan-potensi-minerba-sebelum-dan-menurut-undangundangcipta-kerja-7/>diakses tanggal 17 Juli 2023 Pukul 11.40 Wib

<https://www.bkprn.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-doronginvestasiciptakan-lapangan-kerjddi>diakses tanggal 1 Juni 2022 Pukul 11.00 Wib

DetikFinance, "R.I Akan Caplok 51% Saham Freeport, Jokowi : Ini Sebuah Lompatan", 12 Juli 2018, sebagaimana dalam <https://finance.detik.com/energi/d-4111239/ri-akan-caplok-51saham-freeport-jokowi-ini-sebuah-lompatan> diakses 2 Maret 2023

Kementerian Investasi/BKPM, [https://www.bkpmgo.id/id/publlkasi/siaranpers/read more/2413001/68601](https://www.bkpmgo.id/id/publlkasi/siaranpers/read_more/2413001/68601), (diakses tanggal 20 april 2023 pukul 11.48)

Pidato Visi Indonesia , Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, Sentul 14 Juli 2019.

Mahkamah Konstitusi, "Sejarah dan Perkembangan page=web. Konstitusi di 1.1776#. Indonesia", WYqbWb-cHDc,2015, dalam <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?> Diakses pada 11 april 2023

<http://www.hukumonline.com/klinWdetailVc148/peranan-multilateral-investmentguarantee-agency-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Juli 2023, Pukul 22:20.

https://investor.iWopinion/279356/indonesia-pemain_kuncinikeldunia# 2020(diakses pada tanggal 22 Juni 2023, Pukul: 12.10 WIB).

Kementerian Energi Dan Sumber Daya RI Mineral, "Cadangan Kementerian Batubara Energi Dan Masih Sumber 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong," kementerian energi dan sumber daya mineral ri, diakses tanggal 1 Desember 2021.

<https://migas.esdm.go.id/post/read/Tujuh-Kerja-Sama-ESDM-Indonesia-China-Ditandatangani>, diakses tanggal 9 Maret 2023.

319 [https:// desdm.ntbprov.go.id/article/perizinan-di-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-pasca-terbitnya-undang-undang-nomor-3-tahun-2020.html](https://desdm.ntbprov.go.id/article/perizinan-di-bidang-pertambangan-mineral-dan-batubara-pasca-terbitnya-undang-undang-nomor-3-tahun-2020.html)diakses tanggal 25 Juli 2022 Pukul 21.00 Wib

<https://ekonomi.bisnis.com/readJ20210927/44/1447536/izin-lahan-tambang-antam-antmtumpang-tindih> (Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 Pada Pukul 11:00 WIB)
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220322150327-4-324956/pengusaha-bingungkebijakan-cabut-iup-tambang-tumpang-tindih> (diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pada Pukul 3:00

Republika Online, “Gubernur Kuasai Izin Pertambangan”,
<http://www.republika.co.id/berita/koran/nusantara-koran/14/09/23/ncc8k97-gubernur-kuasai-izin-pertambangan>, diakses 27 September 2022.

Yozami, M. Agus, “Banyak Kepala Daerah Keluarkan IUP Palsu”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3d02d9787d6/banyak-kepala-daerah-keluarkan-iup-palsu>, diakses 1 Oktober 2022.

<https://hmt.mining.itb.ac.id/sektor-tambang-penyelamat-devisa-negara-di-tahun-politik/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

https://bappeda.bondowosokab.go.id/uploads/image/Lampiran_1_Narasi_RPJMN_2020-2024.pdf, Diakses 10 Agustus 2022.

<https://hmt.mining.itb.ac.id/jokowi-cabut-2078-izin-usaha-tambang/> Diakses tanggal 11 Agustus 2022.

<https://www.kompas.com/properiti/read/2022/01/06/145607721/presiden-jokowi-cabut-ribuan-izin-usaha-tambang-kehutanan-dan-hgu> Diakses Tanggal 11 Agustus 2022.

Mohammad Ryan Bakry., dalam diskusi interaktif virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), di Jakarta, 16/1 1/2020/

<https://www.mongabay.co.id/2020/05/19/pengesahkan-uu-minerba-dan-potensi-besar-korupsi-di-sektor-energi-dan-pertambangan/> diakses 12 April 2022.

Daniri, "Menunggu Dukungan Kepastian Hukurn?"
<http://twww.madaniricomi2008/08/05/menunggu-dukungan-kepastian-hukurW>, (Di akses tanggal 1 Desember 2023, Pukul: 11:02 WIB)

<http://www.apbi-icma.org/news/3152/undang-undang-no-3-tahun-2020-tentang-perubahan-uu-no-4-tahun-2009> diakses pada 16 Juli 2022 pukul 21.56

Tirta Citradi, "RI Setop Ekspor Nikel Lebih Cepat, Harga Bakal Melonjak!," CNBC Indonesia
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191029103919-17-110876/ri-setop-ekspor-nikel-lebih-cepat-harga-bakal-melonjak> (diakses 16 Desember,2022)

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>, diakses, 25 Agustus 2023.

Read more: <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/diakses>, 25 Agustus 2023.

Agustinus, M. *Ekspor Tambang Mentah Tak Langgar UU Minerba*. Retrieved from <https://finance.detik.com/energi/d-3402153/esdm-ekspor-tambang-mentahtak-langgar-uu-minerba>. Diakses 20 Agustus 2023.

<https://jurnal.hukumonline.com/dekonstruksi-hukum-sebagai-strategi-pembangunan-hukum-pasca-reformasi>, diakses 24 agustus 2023.

[https://www.google.com/dekonstruksi dan Dekonstruksi hukum](https://www.google.com/dekonstruksi%20dan%20Dekonstruksi%20hukum), diakses 24 agustus 2023.

William R. White , *Financial globalisation*, Bank For International Settlements, Brunner, 19 Juni 2006. ([www. bis.org/pubs.htm](http://www.bis.org/pubs.htm), tanggal 23 Agustus 2023).

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15756&cI=Berita>, "Sistem Konttak Karya Pertambangan Umum akan Diubah RUU Minerba, (di akses pada tanggal 1 Desember 2023, Pukul 11:00 WIB).

https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik, diakses, 6 September 2023

<https://www.google.com/search?q=Desertasi+Pmdn+Dan+Pma+Dalam+Pertambangan>, diakses 1 september 2023.

https://www.kominfo.go.id/content/detail/47151/data-realisasi-investasi-triwulan-iv-tahun-2022/0/artikel_gpr, diakses, 6 September 2023.

Sri Rahayu dan Dheny Wahyudhi, "Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Muaro Jambi", melalui <http://academia.edu>, diakses tanggal 25 Agustus 2023.

Irwandy Arif, "Kepastian Hukum Sektor Pertambangan¹", <http://www.korantempo.com/korantempo/email/2008/06/14/0pini/krn.20080614.133722.id.html>, di akses pada tanggal 1 Desember 2023. Namun demikian ada beberapa daerah yang mengungkapkan bahwa otonomi daerah tidak menghambat masuknya investasi lokal maupun asing. Lihat: <http://wmv.hukumonline.com/berita/baca/h016185/tidak-benar-otonomi-daerah-hambat-investasi>, 'Tidak Benar, Otonomi Daerah Hambat Investasi, (diakses pada tanggal 1 Desember 2023 Pukul: 11:30 WIB).

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-perjanuari-2020>, diakses 20 Agustus 2021.

<https://money.kompas.com/read/2019/12/17/152402426/mengenal-nikel-logamyang-disamakan-edhy-prabowo-dengan-lobster?page=all>, diakses 08 Agustus 2021.

Vale, Nikel, <http://www.vale.com/indonesia/BH/business/mining/nickel/Pages/default.aspx>, diakses 08 Agustus 2023.

Administrator, Posisi Indonesia Sulit Tersaingi, hlm. 1, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tersaingi>, diakses 20 Agustus 2023.

Jacky miner, Teori Pertambangan I, <http://www.http.teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2023

<http://indonesiafile.com/content/view/857/61/>, 'Mengkaji Iklim Investasi dan Kepastian Hukum di Daerah,' (diakses pada tanggal 1 Desember 2023 Pukul: 11:30 WIB).

<https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uud/> diakses 13 Mei 2023 pukul 12.13 WIB

<https://www.liputan6.com/hot/read/5152451/> diakses tanggal 21 April 2023 pukul 11.46 EIB

www.pusakaindonesia.org/nilai-dasar-sila-kelima-dalam-pancasila/. DiH Jurnal Ilmu Hukum

Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, diakses tanggal 21 April 2023 pukul 10.54 WIB

Fawaidurrahman, Mencari Keadilan Hukum di Indonesia: Membendung Keadilan Prosedural

Menuju Keadilan Substansial. <http://fawaidroh.wordpress.com>. Diakses 3 Oktober 2016

pukul 12.05.

European Commissions, “The EU steel industry,”https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses 16 Desember,2022)

Industri All Global Union, “European action day for steel” <http://www.industrialunion.org/european-action-day-for-steel> (diakses 16 Desember,2022)

Tirta Citradi, “RI Setop Ekspor Nikel Lebih Cepat, Harga Bakal Melonjak!,” CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191029103919-17-110876/ri-setop-ekspor-nikel-lebih-cepat-harga-bakal-melonjak> (diakses 16 Desember,2022)

European Commissions, “The EU steel industry,”https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses 16 Desember,2022)

Industri All Global Union, “European action day for steel” <http://www.industrialunion.org/european-action-day-for-steel> (diakses 16 Desember,2022)

Nickel Institute, “The nickel advantage,” <https://nickelinstitute.org/about-nickel/stainless-steel/the-nickel-advantage/> (diakses 23 April 2023)

Administrator, “Posisi Indonesia Sulit Tersaingi,” *Indonesia.Go.Id*

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/posisi-indonesia-sulit-tersaingi> (diakses pada 5 April 2023)

Chandra Gian Asmara, “Soal Larangan Ekspor Nikel, Luhut: Demi RI Raup Rp 170T,” *CNBC News* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190821145313-4-93647/soal-larangan-ekspor-nikel-luhut-demi-ri-raup-rp-170-t> (diakses pada 25 April 2022)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara,” <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/1946/detail> (diakses pada 4 Juni 2023)

European Commission, “The EU steel industry,” https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses pada 1 Mei 2021)
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/industries/metals/steel_en (diakses pada 1 Mei 2022)

Scott Birch, “Global nickel production to decline by 7.4 percent in 2020,” *Mining Global* <https://miningglobal.com/supply-chain-and-operations/global-nickel-production-decline-74-percent-2020> (diakses pada 6 Juni 2023)

Londong Metal Exchange <https://www.lme.com/> (diakses pada 1 Juni 2021)

LME Nickel Historical Price Graph, London Metal Exchange, <https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Nickel#tabIndex=0>. (diakses tanggal 4 Juni 2023)

Euroepan Commissions, “EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105 (6 Juni 2023)

World Trade Organization, “European Union initiates WTO dispute case against Indonesian restrictions on raw materials,”

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds592rfc_26nov19_e.htm (diakses pada 12 Juli 2023)

Muhammad Choirul Anwar, “Uni Eropa Gugat Pembatasan Ekspor Nikel, Begini Penjelasan RI,” *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200108101304-17-128461/uni-eropa-gugat-pembatasan-ekspor-nikel-begini-penjelasan-ri> (diakses pada 13 Juli 2023)

Ferry Sandi, “Makin Panas, RI Vs Uni Eropa Perang Gugatan Soal Ekspor Nikel,” *CNBC Indonesia* <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210225194325-4-226247/makin-panas-ri-vs-uni-eropa-perang-gugatan-soal-ekspor-nikel> (diakses pada 1 April 2023)

Rio Indrawan, “Larangan Ekspor Nikel Digugat, Pemerintah Siap Hadapi Uni Eropa,” *Dunia Energi* <https://www.dunia-energi.com/larangan-ekspor-nikel-digugat-pemerintah-siap-hadapi-unieropa/> (diakses pada 6 Desember 2022)

Pusat Data Penelitian

1. Kemtrian ESDM RI.
2. Kemetrian Investasi/ BKPM RI.
3. Kemetrian Ekonomi RI.
4. Kemetrian Perdagangan RI.
5. Kemetrian Perindustrian RI.
6. Kemetrian BUMN RI.
7. Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Pertambangan Nikel Provinsi Sulawesi Tenggara.